

PENGADILAN AGAMA SENTANI

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2022



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Kemiri No. 143 Sentani

Telp. 0967592645 Fax. 0967592645

Sentani - Papua 99352

e-mail : admin@pa-sentani.go.id



Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sentani adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sentani mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Sentani. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sentani, 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Raswin, Shi
NIP. 198104152011011006



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	15
II. Neraca	17
III. Laporan Operasional	20
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sentani	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	26
A.4. Basis Akuntansi	27
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja	36

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2022	11
Tabel 2 Ringk Neraca per 31 Desember TA 2021 dan 2022.....	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2022.....	35
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2021 dan 2022.....	36
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022	36
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022.....	37
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2021 dan 2022.....	37
Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2021 dan 2022.....	38
Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2021 dan 2022.....	39

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Sentani

Jalan Kemiri No. 143 Sentani Sentani - Papua 99352

Telp. 0967592645 Fax. 0967592645 e-mail : admin@pa-sentani.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sentani telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sentani, 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



RASWIN S.H.I.

NIP.198104152011011006

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 3,812,452,584 atau mencapai 99,90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.**3,812,452,584**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	0	0,00	0
Belanja Negara	3,816,190,000	3,812,452,584	99,90 %	1.455.544.809

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2022 dan 2022

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar 21.956.875.834, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp46.174.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp21.910.701.384; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.60.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.60.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp21.916.875.384, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	%
Aset			
Aset Lancar	46.174.000	0	585.490
Aset Tetap	0	21.956.875.834	(10.140.194.039)
Aset Lainnya	0	0	0
Jumlah Aset	34.553.710	10.140.194.039	(10.105.640.329)
			(99,65)

Kewajiban Jangka Pendek	60.000.000	0	60.000.000	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	60.000.000	0	60.000.000	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	0		0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	21.956.875.384	0	0	0

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.....**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp.....** sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai **Rp.....**. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar **Rp.....** dan surplus(defisit) sebesar **Rp.....** sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar **Rp.....**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 22.102.235.190 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 2.196.076.413 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.

2.010.716.607 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp. 21.916.875.384

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan

basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2022, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA SENTANI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2022			TA 2021
			Anggaran	Realisasi	%	
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	0	0,00	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah			0	0	0,00	0
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	2.435.519.000	1.245.033.843	51,12	1.123.058.809
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.269.247.000	766.137.372	60,36	332.486.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	37.500.000	0	0,00	0
Jumlah Belanja Negara 1.455.544.809			3.742.266.000	2.011.171.215	99,90 %	

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA SENTANI
NERACA
PER 31 Desember 2022 DAN
2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catata	31 Desember 2022	31
		Desember 2021	
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	60.000.000 0	
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	6.174.000	0
	Jumlah Aset Lancar	46.174.000	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	13.706.177.000	13.706.177.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.883.168.967	2.647.732.277
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	8.682.140.091	8.000.042.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	4.789.946	4.789.946
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.365.574.620)	(2.397.086.597)
	Jumlah Aset Tetap	21.910.701.384	21.961.654.626
	Jumlah Aset	21.956.875.384	21.996.793.826
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	60.000.000 0	
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	60.000.000	0
	Jumlah Kewajiban	60.000.000 0	
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		

[REDACTED]

Jumlah Ekuitas Dana	21.916.875.384	21.948.825.836
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	21.956.875.384	21.996.793.826

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA SENTANI
LAPORAN OPERASIONAL PER
31 Desember 2022 DAN
2021

URAIAN	Catatan n	30 Juni 2021	30 Juni 2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1.245.033.843	997.648.207
Beban Persediaan	D. 3	45.133.000	17.783.000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	333.554.154	251.769.213
Beban Pemeliharaan	D. 5	356.838.000	266.323.075
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	12.000.000	38.427.100
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	203.972.024	269.800.141
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2.196.531.021	1.841.750.736
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional			
Kegiatan Non Operasional	D. 12		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	355.000
--	----------	----------------

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13
Beban Luar Biasa	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA SENTANI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2022 DAN
2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	E. 1	22.102.235.190	21.183.781.375
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2.196.076.413)	(1.841.395.736)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	2.010.716.607	2.006.765.659
Ekuitas Akhir			

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sentani

Visi Pengadilan Agama Sentani adalah Visi Pengadilan Agama Sentani adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Sentani yang berwibawa dan bermartabat (Agung).

Misi Pengadilan Agama Sentani adalah Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
- Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Pengadilan Agama Sentani yang profesional dan handal.
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Sentani melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Membangun sikap yang percaya diri untuk mewujudkan Pengadilan Agama Sentani menjadi Peradilan yang mandiri, berwibawa, terhormat, dan dihormati.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dengan berpedoman kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengutamakan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Meningkatkan sumber daya manusia baik teknik yudisial maupun non teknis yudisial melalui bimbingan yang berkesinambungan.
4. Peningkatan pengawasan bagi aparat peradilan, sehingga dapat mewujudkan citra dan wibawa aparat maupun citra kelembagaan yang lebih baik.
5. Mengaktifkan dan memanfaatkan internet/website Pengadilan Agama Sentani, Aplikasi Simkep, Aplikasi Aset, Siadpa Plus, Aplikasi Keuangan dan meja informasi dalam penggunaan dan pengembangannya untuk membantu kelancaran tugas pokok Pengadilan Agama Sentani.
6. Peningkatan sarana dan prasarana, kebersihan dan keamanan serta penyediaan fasilitas umum sehingga akan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
7. Pembinaan organisasi IKAH, IPASPI, PTWP, Dharmayukti Karini, KORPRI dan lainnya guna menunjang tugas kedinasan.
8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar instansi baik di lingkungan Peradilan maupun instansi di tingkat pemerintah Kabupaten/Daerah

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-

dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping

itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Sentani adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

· Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

· Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

· Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
 - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
<i>Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.</i>	10
<i>Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.</i>	20
<i>Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan</i>	25
<i>Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.</i>	50
<i>Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I</i>	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek

(2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

· Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

· Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2022 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Sentani adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA
2022
(dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Total Pendapatan		0	0	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 0 atau 0 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karen:

1. Menurunnya aktivitas jasa sewa rumah dinas;
2. Menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Sentani;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2022 dan
2021
(dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	TA 2022	2021	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
Total Pendapatan		0	0	0	0

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara: Rp
1.613.941.454*

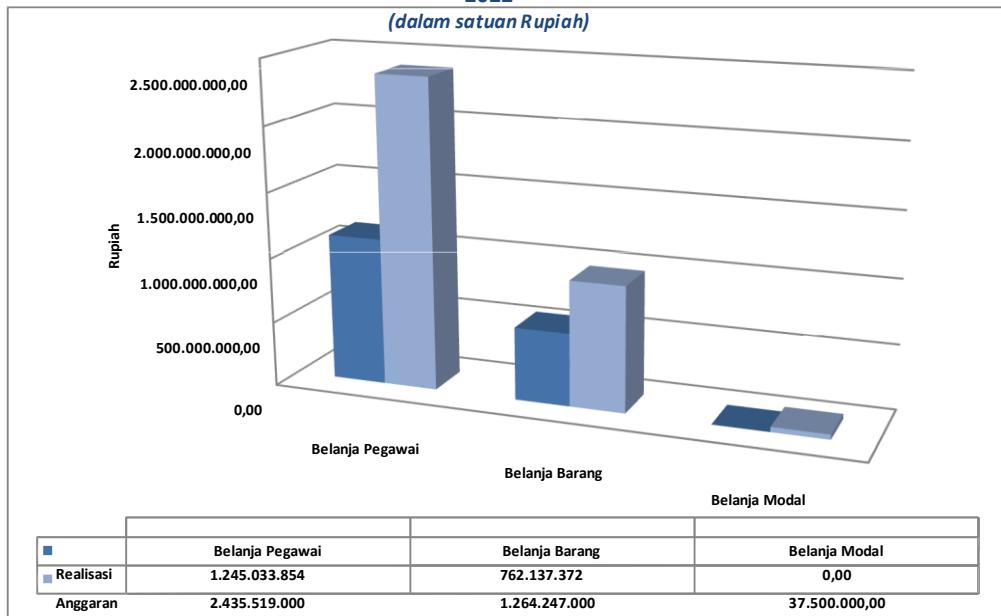
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Sentani per 30 Juni TA 2022 adalah sebesar 4,300,624,000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,90 % % dari anggaran senilai Rp.4,300,624,000 . Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA
2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	31 Desember TA 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.435.519.000	1.245.033.854	51,12
Belanja Barang	1.264.247.000	762.137.372	60,28
Belanja Modal	40.000.000	0	0,00

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAIBA) 2022 & 2021

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Sentani per 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp. 2.011.171.226 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,90 % dari anggaran senilai Rp.4.300.624.000

Perbandingan realisasi belanja TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1.245.033.854	1.123.058.809	8.405.447	0,74
Belanja Barang	762.137.372	332.486.000	231.750.687	69,70
Belanja Modal	37.500.000	39.000.000	1.000.000	1.00
Total Belanja	1.695.700.943	1.455.544.809	240.156.134	16,49

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai : Rp 1.003.349.908

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Sentani per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 adalah sebesar Rp. 1.245.033.854 dan Rp. 1.123.058.809.

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Sentani per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 adalah sebesar Rp. 1.245.033.854 dan Rp. 1.123.058.809. Realisasi Belanja Pegawai TA

2022 mengalami penurunan sebesar 0,74 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. berkurangnya pegawai di pengadilan agama sentani

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	555.544.000	390.695.200	17.447.200	4,46
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.000	6.136	2.027	33,03
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	64.882.000	25.454.970	7.426.700	29,17
Beban Tunj. Anak PNS	22.702.000	7.687.000	2.911.934	37,88
Beban Tunj. Struktural PNS	28.140.000	9.900.000	4.170.000	42,12
Beban Tunj. Fungsional PNS	852.180.000	395.520.000	(14.980.000)	(3,78)
Beban Tunj. PPh PNS	161.909.000	51.741.843	3.737.661	7,22
Beban Tunj. Beras PNS	55.815.000	23.391.660	3.403.740	14,55
Beban Uang Makan PNS	185.064.000	56.632.000	2.133.000	3,76
Beban Tunjangan Khusus	326.980.000	72.360.000	(1.410.000)	(1,94)
Papua PNS				
Beban Tunjangan Umum PNS	10.290.000	3.270.000	1.655.000	50,61
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	172.000.000	86.400.000	(18.091.815)	(20,93)
Total Belanja Brutto	2.435.519.000	1.123.058.809	8.405.447	0,74
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	2.435.519.000	1.123.058.809	8.405.447	0,74

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp609.741.646

6

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Sentani per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 adalah sebesar Rp. 609.741.646 dan Rp. 332.486.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 69,70 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. bertambahnya kebutuhan belanja barang di pengadilan agama sentani

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	167.905.800	63.143.863	55.983.821	88,66
Belanja Barang Non Operasional	850.000	4.738.000	1.943.000	41,00
Belanja Jasa	35.024.953	32.517.735	14.760.971	45,39
Belanja Pemeliharaan	424.734.000	150.633.516	173.295.981	115,04
Belanja Perjalanan Dinas	28.950.000	53.891.600	(13.627.600)	(25,28)
Total Belanja Brutto	609.741.646	332.486.000	231.750.687	69,70
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	609.741.646	332.486.000	231.750.687	69,70

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
35.139.200

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 35.139.200 dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Sentani per 31 Desember 2021 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 1 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	40.000.000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	(4.860.800)	0
Total Aset Lancar	35.139.200	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 60.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 2 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2022
1	Giro	40.000.000	0
	Jumlah	40.000.000	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 60.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetor ke rekening Kas Negara pada tanggal 02 Januari 2012 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 0150150151222551.

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp0*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. (0) dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 3 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No. 2021	Jenis	31 Desember TA 2022	31 Desember TA
	Jumlah	0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp0*

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		0	0

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp 21.996.793.826 Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji sebesar Rp. 21.996.793.826 dan Rp.

21.996.793.826 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan
1	Tanah	13.706.177.000	13.706.177.000	(10.895.577.000)
2	Peralatan dan Mesin	2.647.732.277	2.647.732.277	(257.990.000)
3	Gedung dan Bangunan	8.000.042.000	8.000.042.000	1.668.614.000
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0

Jumlah	21.961.654.626	21.961.654.626	(9.226.963.000)
Akumulasi Penyusutan	(2.397.086.597)	(2.397.086.597)	(913.231.039)
Nilai Buku Aset Tetap	21.996.793.826	21.996.793.826	(10.140.194.039)

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp13.706.177.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 13.076.177.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	139		Pengadilan Agama Sentani	Rumah Dinas	518.354.000
2	2	122		Pengadilan Agama Sentani	Rumah Dinas	419.055.000
3	1	3000		Mahkamah Agung RI	Gedung Kantor	12.768.768.000
Jumlah						13.706.177.000

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2021 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 10.895.577.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 2.647.732.277

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2021 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.647.732.277 dan Rp. 257.990.000.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2021	2.647.732.277
Mutasi Tambah	

Mutasi Kurang

Saldo per 31 Desember 2021

0

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021

0

Nilai Buku 31 Desember 2022

2.647.732.277

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
8.000.042.000*
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.000.042.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	8.000.042.000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	8.000.042.000

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2017	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 0
 Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2017	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0*
Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
(2.397.086.597)*
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah Rp. 2.397.086.597.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2022 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 7 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek:
Rp 0*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.

0 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2021 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Sentani per 30 Juni 2022 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 1. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Uang Muka dari KPPN 0	60.000.000	
Jumlah 0	60.000.000	

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 60.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.

60.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp 0*

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. Rp. 21.948.825.836. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31

Desember

2022 terdapat

penurunan

nilai

Kewajiban

sebesar Rp.

(10.131.063.2

47) (0%) dari

nilai per 31

Desember TA

2021. Jumlah

nilai

Kewajiban

pada periode

yang berakhir

tanggal 31

Desember

2022 adalah

sebesar Rp.

9.130.792 ,

sedangkan

per 31

Desember TA

2021 tercatat

sebesar Rp.

10.140.194.03

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNbp : Rp

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar

Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Total Pendapatan			171.344	0,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp
1.131.464.256

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.131.464.256 dan Rp1.123.058.809. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2021 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	394.079.080	390.695.200	17.447.200	4,46
Beban Pembulatan Gaji PNS	8.121	6.136	2.027	33,03

Beban Tunj. Suami/Istri PNS	30.055.140	25.454.970	7.426.700	29,17
Beban Tunj. Anak PNS	11.023.372	7.687.000	2.911.934	37,88
Beban Tunj. Struktural PNS	14.070.000	9.900.000	4.170.000	42,12
Beban Tunj. Fungsional PNS	310.190.000	395.520.000	(14.980.000)	(3,78)
Beban Tunj. PPh PNS	46.585.135	51.741.843	3.737.661	7,22
Beban Tunj. Beras PNS	24.477.960	23.391.660	3.403.740	14,55
Beban Uang Makan PNS	53.501.000	56.632.000	2.133.000	3,76
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	64.370.000	72.360.000	(1.410.000)	(1,94)
Beban Tunjangan Umum PNS	4.590.000	3.270.000	1.655.000	50,61
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	50.400.000	86.400.000	(18.091.815)	(20,93)
Total Beban Pegawai	1.003.349.808	1.123.058.809	8.405.447	0,74

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp 0

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	0	0	0	0

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp 0

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Jasa	0	0	0	0

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian

Beban sember TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

T
a
b
e
l

4
1

R
i
n
c
i
a
n

B
e
b
a
n

P
e
r
j
a
l
a
n
a
n

D
i
n
a
s

p
e
r

3
1

D
e

	U	TA 2021	Naik(Turun)	%
	Beban Perjalanan	0	0	0
Kota	Beban Perjalanan	0	0	0
	Beban Perjalanan	0	0	0
Meeting dalam Kota	Beban Perjalanan	0	0	0
Meeting luar Kota	Beban Perjalanan	0	0	0
	Total Beban Perjalanan	0	0	0

D.7.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat :
Rp

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dala... kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2021 dan TA 2021 (dalam satuan Rupiah)

	U	TA 2021	Naik(Turun)	%
	Beban Gedung	0	0	0
untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	Beban Gedung	0	0	0
	Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
	Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0

D.8.

Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial : Rp

Beban Bantuan
Sosial Tahun
Dinas untuk
periode yang
berakhir pada
31 Desember
2022 dan
2021

adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp..... Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp..... Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2021 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan				

Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
	Jumlah Amortisasi			
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni TA 2021 dan TA 2021 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai

berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel	0	0	0	0

Peralatan dan Mesin

Beban Aset Extrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Extrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional Rp: Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni TA 2021 dan TA 2021 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2021	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNBP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1.Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp.....

E.2.Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp..... dan Rp..... Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp..... dan Rp..... Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing- masing sebesar Rp.... Dan Rp..... Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0

Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp... dan Rp.... Revaluasi Aset tersebut berasal

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp.... Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp..... dan Rp.....

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 31 Desember TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	0
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	0

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2022 , DDEL sebesar Rp..... sedangkan DKEL sebesar Rp.....

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BAN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 , sebesar-. dari total,- yang diterima sepanjang tahun 2022 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 , adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

E.3.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar

Rp9.130.792 dan Rp10.140.194.039

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

tidak ada pengungkapan terhadap neraca akrual pada pengadilan agama sentani untuk tahun 2022.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Sentani adalah:

1. BRI UNIT SENTANI A/C 00003625-01-000010-30-7 a.n. BPg 063 Pengadilan Agama Sentani yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp.0. TUJUAN PEMBUKAAN REKENING DARI KPPN JAYAPURA NOMOR : S-1062/WPB.33/KP.063/2015

2. BANK BRI UNIT SENTANI A/C 0003625-01-000033-30-5 a.n. BPG. 063 PENGADILAN AGAMA SENTANI yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0. TUJUAN PEMBUKAAN REKENING DARI KPPN JAYAPURA NOMOR : S-1411/WPB.33/KP.063/2015

3. BRI A/C 3625-01-022346-53-0 a.n. BENDAHARA PENERIMA BIAYA PERKARA PENGADILAN yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.30.542.172. Tujuan Pembukaan Rekening penampung panjar biaya perkara

F.2.4. Revisi DIPA

tidak ada perubahan POK pengadilan agama sentani untuk semester I tahun anggaran 2022.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

tidak terdapat ralat SPM atau SP2D untuk Semester I tahun anggaran 2022.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

tidak ada perubahan tim pengelola anggaran di pengadilan agama sentani untuk semester I tahun 2022 ini.

LAPORAN PENDUKUNG

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

Pengadilan Agama Sentani

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022

		Manfaat		Per 31 Desember 2021 Desember 2022	2022	Per 31 Desember 2022	Per 31
A.	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7					
2	Alat Kantor	5					
3	Alat Rumah Tangga	5					
4	Alat Studio	5					
5	Peralatan Pemancar	10					
6	Komputer Unit	4					
7	Peralatan Komputer	4					
B.	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50					
2	Bangunan Gedung Tempat	50					
C.	Tinggal						
D.	Aset Tetap Lainnya						

	1 Bahan Perpustakaan Tercetak	-					
E.	set Tetap yang Tidak Digunakan						
1	lat Angkutan Darat Bermotor	7					
2	lat Kantor	5					
3	lat Rumah Tangga	5					
4	Komputer Unit	4					
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap							
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya							



Pengadilan Agama Sentani
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember

2022

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		Jumlah :					

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



005
01
2500
614769

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SENTANI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember TAHUN
2022

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT